

ABSTRAK

Tindak pidana *illegal logging* pada dasarnya merupakan kegiatan yang diawali dengan penebangan hutan untuk mendapatkan kayu, pengangkutan, hingga penjualan kayu yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan atau tidak sah karena tidak memiliki izin resmi dari instansi yang berwenang. Kepolisian merupakan institusi penegak hukum yang menjadi ujung tombak atau garda terdepan bagi keberhasilan upaya penegakan hukum pidana melalui kegiatan penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Polres Rembang dan untuk mengetahui hambatan serta penyelesaian penanganan hambatan tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Sebagai pisau analisis digunakan teori penegakan hukum, teori kepastian hukum dan teori fungsional struktural.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa proses penyidikan tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Polres Rembang dilaksanakan berpedoman pada KUHAP dan Perkap Polri Nomor 16 Tahun 2019. Dasar dilakukannya penyidikan adalah laporan pihak Perhutani yang telah mengamankan pelaku dan barang bukti. Selanjutnya dibuatkan Laporan Polisi, diterbitkan surat perintah penyidikan dan SPDP. Penyidik selanjutnya melakukan upaya paksa berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan saksi/ahli dan tersangka. Setelah penyidikan dibuat resume sebagai ikhtisar dan disusun dalam berkas perkara untuk selanjutnya diserahkan ke penuntut umum berikut tersangka dan barang bukti. Hambatan di dalam penegakan hukum pidana pada tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Polres Rembang adalah hambatan dari undang-undang, pengembalian berkas perkara dari penuntut umum, permohonan permintaan saksi ahli yang lama dan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat. Penyelesaian dalam menangani hambatan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Polres Rembang adalah dengan menyelesaikan proses penyidikan sesuai dengan prosedur, melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk penuntut umum, menunggu saksi ahli hadir atau melakukan pemeriksaan di lokasi saksi ahli, serta melakukan koordinasi dengan perhutani dan Bhabinkamtibmas untuk dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat.

Kata kunci : penyidikan, tindak pidana, *illegal logging*

ABSTRACT

Illegal logging is basically an activity that begins with the cutting down of forests to obtain timber, transportation, to the sale of wood that is carried out in accordance with the rules or illegitimate because it does not have official permission from the authorized agency. The police force is a law enforcement institution that is at the forefront or the frontline for the success of criminal law enforcement efforts through investigative activities. This study aims to determine the process of investigating criminal acts of illegal logging in the Rembang Police jurisdiction and to determine the obstacles and the resolution of these obstacles.

The approach method used is empirical juridical, analytical descriptive research specifications. The data used is secondary data. Data collection methods are literature study and field study. The data analysis method uses qualitative analysis. As a knife of analysis, law enforcement theory, legal certainty theory and structural functional theory are used.

The results showed that the investigation process of illegal logging in the Rembang Police jurisdiction was carried out based on the Criminal Procedure Code and Perkap Polri No. 16 of 2019. The basis for the investigation was a report by Perhutani who had secured the perpetrators and evidence. Furthermore, the Police Report was prepared, an investigation order and SPDP were issued. The investigator then made a forced effort in the form of summons, arrest, detention, confiscation, examination of witnesses / experts and suspects. After the investigation, a resume is made as an overview and compiled in the case file for further submission to the public prosecutor along with the suspect and evidence. Obstacles in criminal law enforcement in illegal logging in the Rembang Police area are obstacles from the law, returning case files from public prosecutors, requests for long-standing expert witnesses and a lack of legal awareness from the public. The solution in handling obstacles of criminal law enforcement against illegal logging in the Rembang Police area is by completing the investigation process in accordance with procedures, completing case files according to the instructions of the public prosecutor, waiting for expert witnesses to attend or conducting inspection at the location of expert witnesses, and coordinating with Perhutani and Bhabinkamtibmas to conduct socialization to the community.

Keywords: *investigation, illegal logging*